

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Bank umum syariah yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, PT Bank BRI Syariah, PT Bank BJB Syariah, PT Bank BNI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Mega Syariah, PT Bank BCA Syariah, PT Bank BTPN Syariah, PT Bank Bukopin Syariah dan PT Bank Panin Dubai Syariah. Berikut adalah gambaran umum objek penelitian:

4.1.1. PT Bank Muamalat Indonesia

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanan bisnisnya sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLKM Muamalat) dan multifinance syariah (AlIjarah Indonesia Finance).

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bank Muamalat Indonesia semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM

Muallamat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima , serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).

4.1.2. PT Bank BRI Syariah

Sejarah pendirian PT. Bank BRI Syariah Tbk tidak lepas dari akuisisi yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat no. 16/17/Kep.GBI/DPG/2008 pada 16 Oktober 2008 BRI Syariah resmi beroperasi pada 17 November 2008 dengan nama PT. Bank BRI Syariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam.

Pada 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah. Proses spin off tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah.

4.1.3. PT Bank BJB Syariah

Pendirian Bank BJB Syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu. Pada tanggal 6 Mei 2010 Bank BJB Syariah memulai usahanya, setelah diperoleh Surat Ijin Usaha dari Bank Indonesia Nomor 12/629/DPbS tertanggal 30 April 2010, dengan terlebih dahulu dilaksanakan cut off dari Divisi/Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. yang menjadi cikal bakal Bank BJB Syariah.

Hingga saat ini Bank BJB Syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Braga No 135 dan telah memiliki 8 (delapan) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu 55 (lima puluh lima) jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di daerah Provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta dan 49.630 jaringan ATM Bersama. Pada tahun 2013 diharapkan Bank

BJB Syariah semakin memperluas jangkauan pelayanannya yang tersebar di daerah Provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.

4.1.4. PT Bank BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil dengan berlandaskan Undang-undang No 10 tahun 1998. Pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di samping itu komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

4.1.5. PT Bank Syariah Mandiri

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta

membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No.10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagai tercantum dalam Akta Notaris : Sutjipto, SH, No.23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.1/24/KEP.GBI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

4.1.6. PT Bank Mega Syariah

Berawal dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No.1046/KMK/013/1990 tersebut, di akuisisi CT Corpora (d/h Para Group) melalui Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin mengonversi bank umum konvensional itu menjadi bank umum syariah. Keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu di konversi menjadi bank syariah melalui Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004 menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004, sesuai dengan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No.6/11/KEP.DpG/2004. Pengonversian tersebut dicatat dalam sejarah

perbankan Indonesia sebagai upaya pertama pengonversian bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.

Pada 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan perubahan bentuk logo BSMI ke bentuk bank umum konvensional yang menjadi sister company-nya, yakni PT Bank Mega Tbk, tetapi berbeda warna. Sejak 2 November 2010 sampai dengan sekarang, melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/75/KEP.GBI//DpG/2010/, PT Bank Syariah Mega Indonesia berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah.

4.1.7. PT Bank BCA Syariah

PT. Bank BCA Syariah ("BCA Syariah") berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010. BCA Syariah mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia sebagai bank yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpun dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Masyarakat yang menginginkan produk dan jasa perbankan yang berkualitas serta ditunjang oleh kemudahan akses dan kecepatan transaksi merupakan target dari BCA Syariah.

Komitmen penuh BCA sebagai perusahaan induk dan pemegang saham mayoritas terwujud dari berbagai layanan yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah BCA Syariah pada jaringan cabang BCA yaitu setoran (pengiriman uang) hingga tarik tunai dan debit di seluruh ATM dan mesin EDC (Electronic Data Capture) milik BCA, semua tanpa dikenakan biaya. Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi maupun menyampaikan pengaduan dan keluhan, masyarakat dan nasabah khususnya dapat menghubungi Halo BCA di 1500888.

Jaringan cabang BCA Syariah tersebar di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Surabaya, Semarang, Bandung, Solo, Yogyakarta, Medan, Palembang, Malang, Lampung, Banda Aceh, Kediri, Pasuruan, dan Panakkukang.

4.1.8. PT Bank BTPN Syariah

BTPN Syariah adalah anak perusahaan BTPN, dengan kepemilikan saham 70% dan merupakan bank syariah ke 12 di Indonesia. Bank beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat terpencil yang belum terjangkau serta segmen masyarakat pra sejahtera. Selain menyediakan akses layanan keuangan kepada masyarakat tersebut, BTPN Syariah juga menyediakan pelatihan keuangan sederhana untuk membantu mata pencaharian nasabahnya agar dapat terus berlanjut serta membina masyarakat yang lebih sehat melalui program Daya-nya.

Visi, Misi dan Nilai BTPN Syariah mencerminkan arah usahanya agar tujuannya mengembangkan jutaan rakyat Indonesia terpenuhi. Visinya adalah untuk menjadi Bank Syariah yang terbaik dan sekaligus mengembangkan keuangan inklusi sehingga dapat mengubah kehidupan jutaan masyarakat. Sejalan dengan ini, adalah misi-nya untuk bekerja sama menciptakan peluang pertumbuhan usaha dan mencapai kehidupan yang lebih berarti. Bank berusaha untuk mencapai visi dan misi-nya dengan membina empat nilai utama, yaitu profesionalisme, integritas, saling menghargai dan kerja sama.

4.1.9. PT Bank Bukopin Syariah

PT BANK SYARIAH BUKOPIN (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank

Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank.

4.1.10. PT Bank Panin Dubai Syariah

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (“Panin Dubai Syariah Bank”), berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Panin Life Center, Jl. Letjend S. Parman Kav. 91, Jakarta Barat.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Panin Dubai Syariah Bank, ruang lingkup kegiatan Panin Dubai Syariah Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam. Panin Dubai Syariah Bank mendapat ijin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 2 Desember 2009.

4.2. Analisis Data dan Hasil Penelitian

4.2.1. Rasio Kinerja *Maqashid Shariah Index* pada Bank Umum Syariah

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kinerja bank umum syariah dengan menggunakan pendekatan *Maqashid Shariah Index* untuk mengetahui sejauh mana bank syariah melaksanakan setiap tujuan-tujuan syariah dalam menjalankan usahanya yang berkaitan dengan rasio kinerja *Maqashid Shariah Index*. Tujuan-tujuan syariah tersebut dapat diukur melalui rasio kinerja *Maqashid Shariah Index* yang telah di bagi ke dalam tiga tujuan berdasarkan Abu Zahrah, yaitu :

1. Pendidikan Individu (*Tahdib al-Fardh*)
2. Menegakkan Keadilan (*Iqamah al-Adl*)
3. Mewujudkan Kesejahteraan (*Jaib al-Maslahah*)

4.2.1.1. Tujuan Pendidikan Individu (*Tahdib al-Fardh*)

Tabel 4.1.

Rasio Kinerja Pendidikan Individu *Maqashid Shariah Index*

Pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020

No	BUS	Rasio Kinerja Tujuan Pertama			
		R1 ¹ (%)	R2 ¹ (%)	R3 ¹ (%)	R4 ¹ (%)
1	BMI	0,16	0,28	1,33	2,02
2	BRIS	0,03	0,00	0,37	1,44
3	BJBS	0,0058	0,0048	0,00	0,00
4	BNIS	0,13	0,00	1,88	3,87
5	BSM	0,22	0,01	0,98	1,48
6	BMS	0,00	0,00	0,57	0,00
7	BCAS	1,44	0,00	0,00	0,49
8	BTPNS	2,07	0,00	2,14	0,50
9	BBS	0,00	0,00	1,44	1,74
10	BPDS	0,65	0,00	0,65	2,04

Sumber : Data diolah 2021

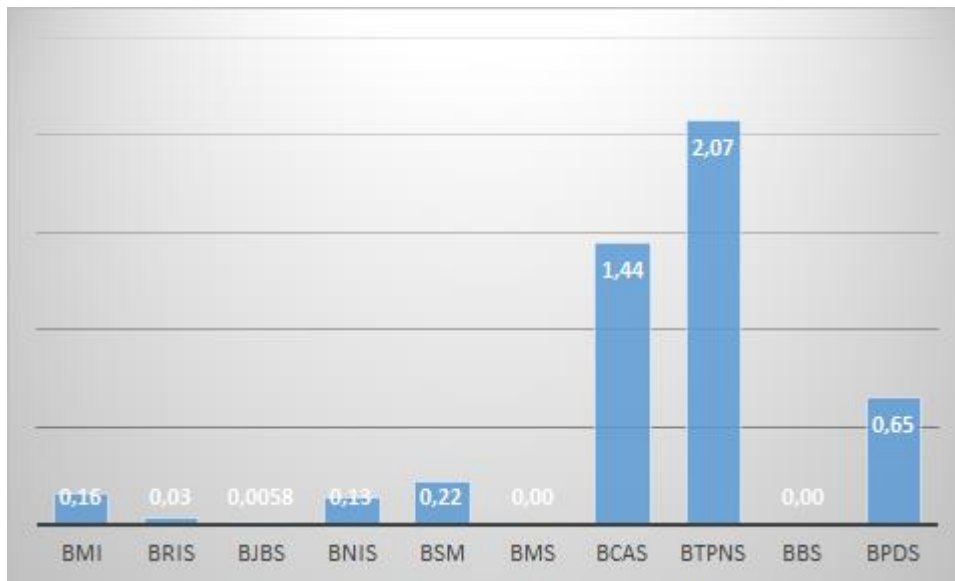
1) Hibah Pendidikan (R1¹)

Rasio kinerja yang pertama dan tujuan pertama dalam Maqashid Shariah Index yaitu Hibah Pendidikan. Hibah pendidikan yaitu pengeluaran yang dilakukan bank syariah dalam bidang pendidikan bagi masyarakat. Hibah pendidikan yang dikeluarkan bank syariah dalam bentuk beasiswa dan bantuan kepada lembaga pendidikan sebagai wujud tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap masyarakat.

Gambar 4.1.

Rasio Kinerja Hibah Pendidikan Maqashid Shariah Index

Pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020



Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat diketahui terdapat 10 bank syariah yang menjelaskan mengenai hibah pendidikan yang disalurkan kepada masyarakat. Bank Mega Syariah dan Bank Bukopin Syariah yang tidak mengungkapkan hibah pendidikan. Penyaluran tertinggi untuk hibah pendidikan adalah Bank BTPN Syariah (BTPNS) dengan total hibah pendidikan sebesar 213 triliun dan persentase sebesar 2,07 % dari tahun 2015-2020. Dari dana yang sudah dialokasikan ditujukan untuk hibah pendidikan.

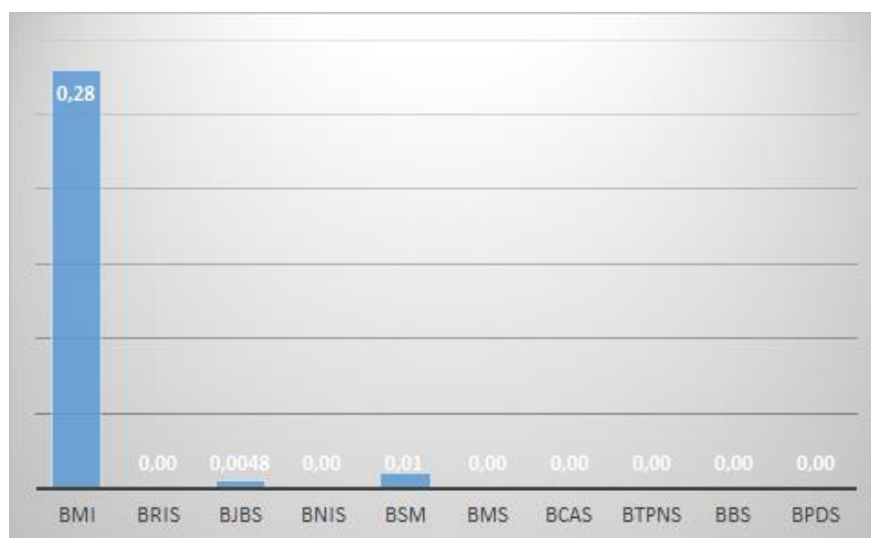
Hasil persentase tersebut tidak lepas dari program pendidikan yang dijalankan oleh Lembaga Zakat Nasional Bank BTPN Syariah (LAZNAS BTPNS) yang digagas oleh Bank BTPN Syariah itu sendiri dan BTPNS memberikan bukti bahwa pendidikan bagi masyarakat itu sangatlah penting dengan mengalokasikan dana yang besar untuk hibah pendidikan . Sedangkan penyaluran terendah untuk hibah pendidikan adalah Bank BJB Syariah (BJBS) dengan persentase sebesar 0,0058%. Dikarenakan BJBS hanya mengungkapkan hibah pendidikan dari tahun 2016-2020 dengan total pendidikan sebesar 216 miliar, hal ini yang menyebabkan BJBS menjadi urutan terendah.

2) Penelitian (R2¹)

Rasio kinerja yang kedua dan tujuan pertama dalam Maqashid Shariah Index menggambarkan alokasi dana yang dikeluarkan untuk tujuan penelitian dan pengembangan bank syariah. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan produk-produk baru yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat memperkuat kedudukan dalam industri perbankan syariah.

Gambar 4.2.

Rasio Kinerja Penelitian Maqashid Shariah Index
Pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020



Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan Gambar 4.2. dapat diketahui rasio penelitian, dari 10 bank syariah yang dijadikan sampel hanya 3 bank syariah yang mengalokasikan dana yang dimilikinya untuk penelitian dan pengembangan yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank BJB Syariah (BJBS) dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Penyaluran tertinggi dalam rasio penelitian adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan persentase sebesar 0,28% dan total pengalokasian dana mencapai 31 miliar dari tahun 2015-2020. Selanjutnya diikuti oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan persentase 0,01 % dari total pengalokasian dana sebesar 3 miliar dari tahun 2015-2020.

Kemudian penyaluran terendah yaitu Bank BJB Syariah (BJBS) dengan persentase 0,0048 % dan total pengalokasian dana terhadap penelitian dan

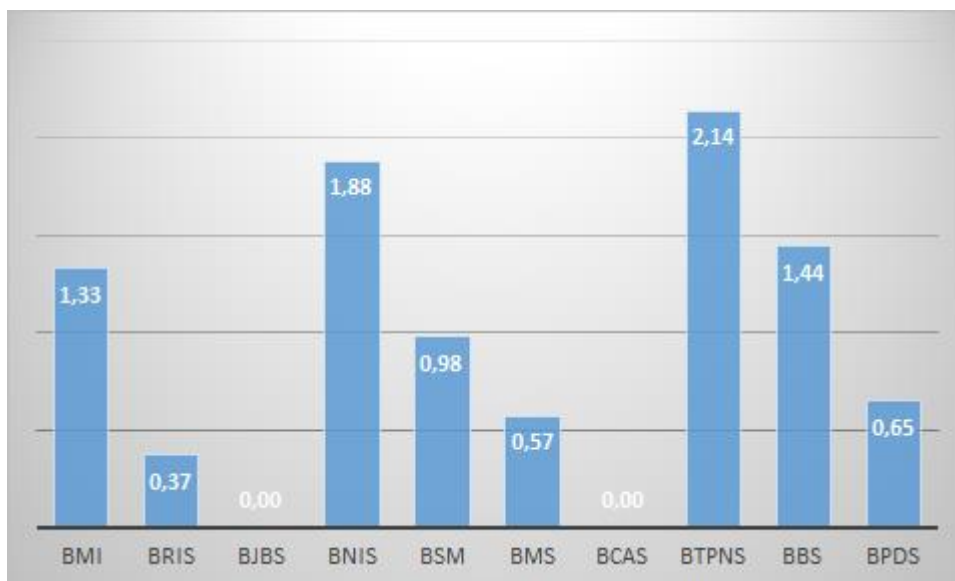
pengembangan sebesar 417 juta dari tahun 2015-2020. Meskipun Bank BJB Syariah (BJBS) memiliki total pengalokasian yang sangat kecil dibanding dengan bank syariah lainnya, akan tetapi Bank BJB Syariah (BJBS) terus mengalokasikan dana untuk biaya penelitian dan pengembangan, bertujuan untuk mengembangkan ragam maupun fitur-fitur produk, seperti produk-produk yang ditawarkan kepada nasabah.

3) Pelatihan (R3¹)

Rasio kinerja yang ketiga dan tujuan pertama dalam Maqashid Shariah Index menggambarkan jumlah dana yang dikeluarkan oleh bank syariah dalam melatih dan memberikan pendidikan lebih lanjut pada karyawan. Pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan atau pemahaman serta soft skill dan hard skill pada karyawan sehingga bank dapat beroperasi secara maksimal. Selain itu, bank syariah juga memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menempuh pendidikan yang lebih lanjut sehingga dapat memaksimalkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya lebih baik.

Gambar 4.3.

Rasio Kinerja Pelatihan Maqashid Shariah Index
Pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020



Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan Gambar 4.3. hanya Bank BJB Syariah (BJBS) yang tidak mengalokasikan dana yang dimilikinya untuk pendidikan dan pelatihan. Dan dapat diketahui bahwa Bank BTPN Syariah (BTPNS) menjadi peringkat tertinggi dalam rasio pelatihan dengan persentase 2,14% dan total dana yang dialokasikan untuk pelatihan sebesar 213 miliar. Bank BTPN Syariah (BTPNS) terus meningkatkan pelatihan-pelatihan untuk para pegawainya, terbukti bahwa dari tahun 2015-2020 selalu mengalami peningkatan.

Pada urutan kedua yaitu Bank BNI Syariah (BNIS) dengan persentase 1,88% dan diikuti oleh Bank Bukopin Syariah (BBS) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan persentase 1,44 % dan 1,33%. Sedangkan, bank syariah pada urutan terendah dimiliki oleh Bank BRI Syariah (BRIS) dengan persentase 0,37 % dari total dana yang dialokasikan untuk pelatihan sebesar 39 miliar pada tahun 2015-2020. Hasil tersebut membuat BRIS menjadi urutan terendah, akan tetapi hasil ini cukup baik jika dibandingkan dengan BJBS dan BCAS yang tidak mengeluarkan dananya untuk biaya pelatihan.

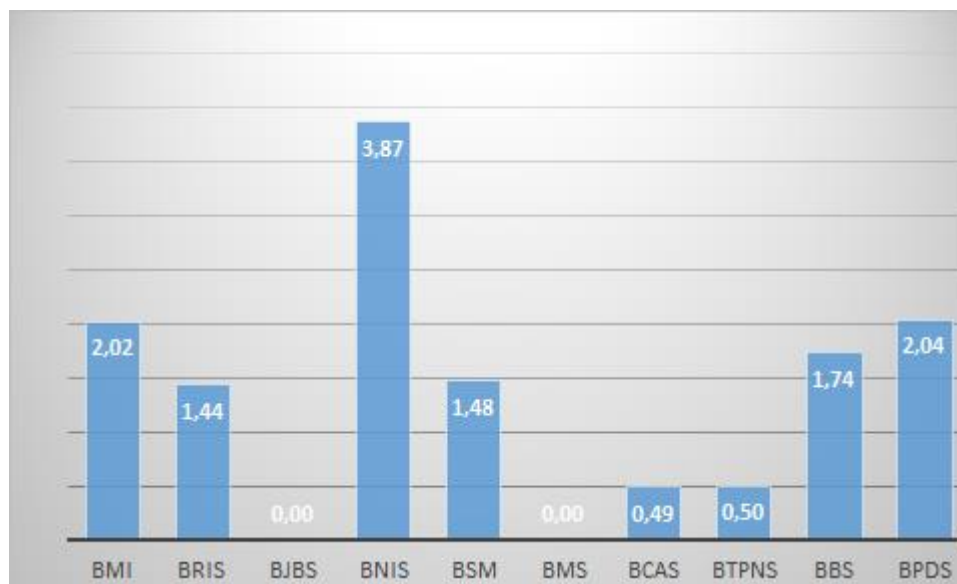
4) Publikasi/Promosi (R4¹)

Rasio kinerja yang keempat pada Maqashid Shariah Index menggambarkan alokasi dana yang dikeluarkan untuk mempublikasi atau mempromosikan bank syariah kepada masyarakat luas. Promosi sangatlah penting bagi bank syariah, tanpa promosi bank syariah akan lambat berkembang dikarenakan promosi mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk menarik minat nasabah. Dengan adanya promosi yang dilakukan bank syariah maka masyarakat dapat mengetahui informasi-informasi mengenai bank syariah serta dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang-tentang keunggulan yang dimiliki bank syariah dan memberikan pengetahuan mengenai perbedaan bank syariah dengan bank konvensional yang selama ini sebagian masyarakat menganggap bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional.

Gambar 4.4.

Rasio Kinerja Publikasi Maqashid Shariah Index

Pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020



Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan Gambar 4.4. terdapat bank syariah yang tidak mengalokasikan dana yang dimilikinya untuk publikasi yaitu Bank BJB Syariah (BJBS) dan Bank Mega Syariah (BMS) dan dapat diketahui rasio publikasi tertinggi dimiliki oleh Bank BNI Syariah (BNIS) dengan persentase 3,87 % dan total dana alokasi untuk publikasi sebesar 446 miliar dari tahun 2015-2020. Urutan selanjutnya yaitu Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan persentase 2,04% dan 2,02%. Sedangkan rasio yang terendah dimiliki oleh Bank BCA Syariah (BCAS) dengan persentase 0,49 % dengan pengalokasian dana untuk publikasi sebesar 5 miliar. Hasil tersebut membuat BCAS menjadi urutan terendah, akan tetapi hasil ini cukup baik jika dibandingkan dengan BJBS dan BMS yang tidak mengeluarkan dananya untuk biaya publikasi.

4.2.1.2. Tujuan Menegakkan Keadilan (Iqamah al-Adl)

Tabel 4.2.

Rasio Kinerja Menegakkan Keadilan Maqashid Shariah Index

Pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020

No	BUS	Rasio Kinerja Tujuan Kedua		
		R1 (%)	R2 (%)	R3 (%)
1	BMI	1,56	51,64	100,00
2	BRIS	6,31	42,27	100,00
3	BJBS	9,93	24,54	100,00
4	BNIS	14,75	26,35	100,00
5	BSM	11,84	35,00	100,00
6	BMS	8,02	20,69	100,00
7	BCAS	12,48	55,23	100,00
8	BTPNS	29,89	0,97	100,00
9	BBS	3,17	0,59	100,00
10	BPDS	-16,64	81,00	100,00

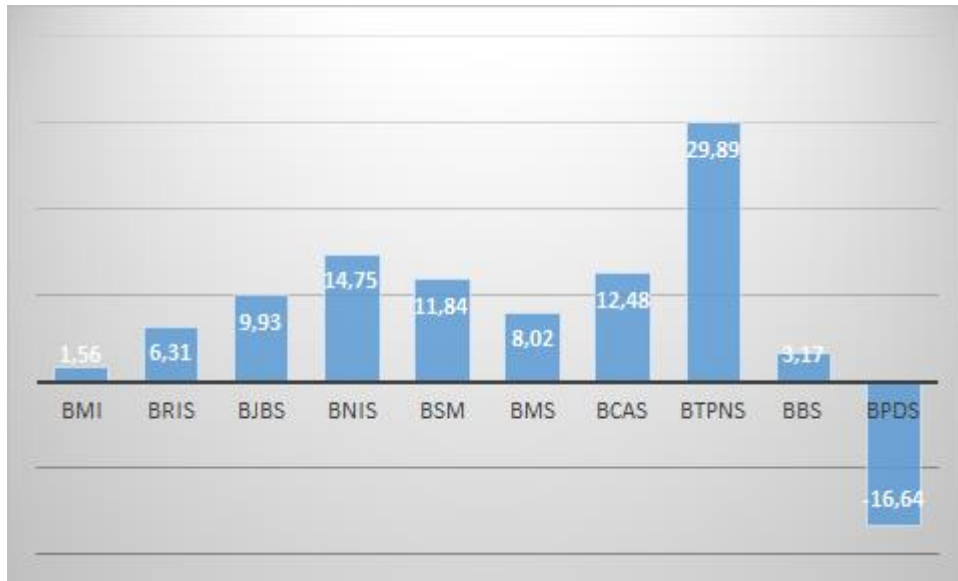
Sumber : Data diolah 2021

1) Pengembalian yang Adil (R1²)

Rasio kinerja yang pertama dan tujuan kedua pada Maqashid Shariah Index menggambarkan besarnya laba yang dihasilkan bank syariah. Semakin besar laba yang dihasilkan bank syariah, maka semakin besar bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah dan stakeholder.

Gambar 4.5.

Rasio Kinerja Pengembalian yang Adil Maqashid Shariah Index
Pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020



Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan Gambar 4.5. dapat diketahui yang memiliki persentase rasio tertinggi adalah Bank BTPN Syariah (BTPNS) dengan persentase 29,89% dari total pendapatan, dengan total laba sebesar 6 triliun. BTPNS mengalami peningkatan laba usaha setiap tahunnya dari tahun 2015-2020. Urutan selanjutnya yaitu Bank BNI Syariah (BNIS) dan Bank BCA Syariah (BCAS) dengan masing-masing persentase rasio sebesar 14,75% dan 12,84% dari total pendapatan.

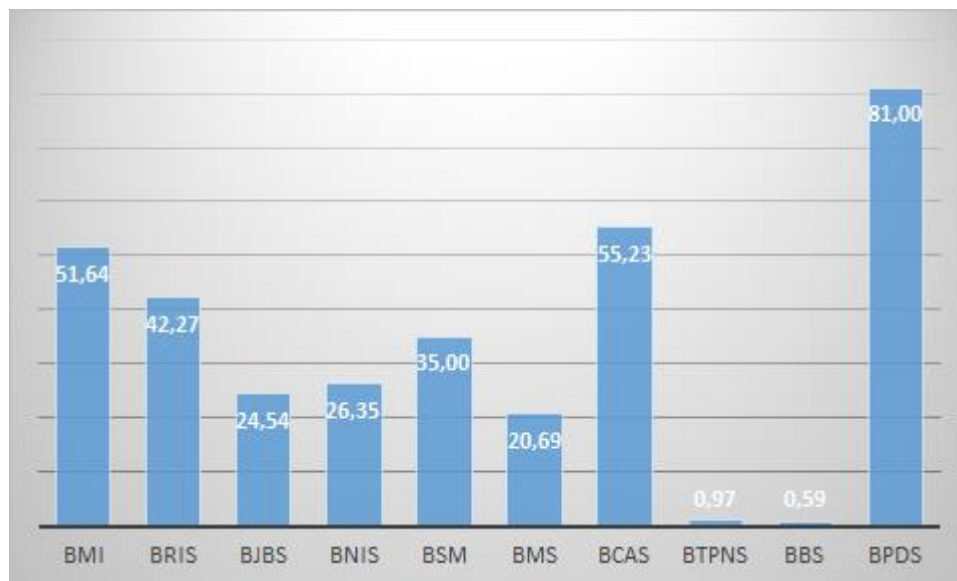
Sedangkan bank syariah yang memiliki urutan terendah yaitu Bank Panin Dubai Syariah (BMI) dengan persentase -16,64%. Dengan demikian hasil ini dapat dijadikan sebagai motivasi bagi perbankan syariah terutama BPDS untuk terus meningkatkan dan memperbaiki kinerja perbankan syariahnya di masa mendatang agar tujuan pengembalian yang adil dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

2) Distribusi Fungsional (R^2)

Rasio kinerja yang kedua dan tujuan kedua dalam Maqashid Shariah Index menggambarkan penyaluran mudharabah dan musyarakah terhadap total seluruh model pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah.

Gambar 4.6.

Rasio Kinerja Distribusi Fungsional Maqashid Shariah Index
 Pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020



Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan Gambar 4.6. dapat diketahui yang memiliki persentase rasio tertinggi adalah Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) dengan persentase 81,00 % dari total pembiayaan dengan jumlah pembiayaan mudharabah dan musyarakah sebesar 34 triliun dari tahun 2015-2020. Meskipun pembiayaan mudharabah dan musyarakah mengalami fluktuasi setiap tahunnya akan tetapi BPDS memiliki rasio tertinggi dibanding dengan bank syariah lainnya.

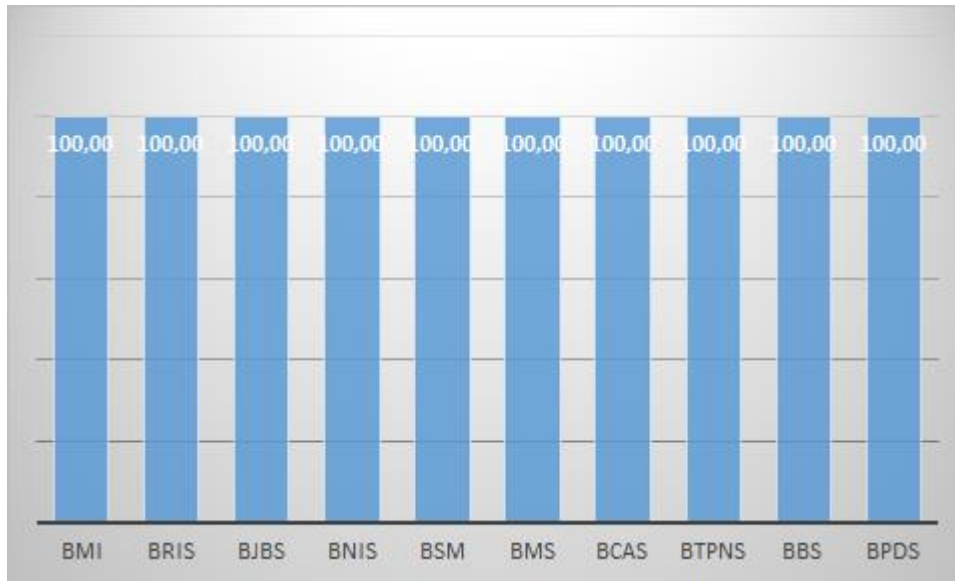
Pada urutan kedua dan urutan selanjutnya secara berturut-turut diduduki oleh Bank BCA Syariah (BCAS) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan masing-masing persentase rasio sebesar 55,23 % dan 51,64 %,.. Sedangkan bank syariah yang memiliki rasio terendah yaitu Bank Bukopin Syariah (BBS) dengan persentase sebesar 0,59 % dengan total pembiayaan mudharabah dan musyarakah sebesar 15 triliun dari tahun 2015-2020.

3) Produk Bebas Bunga (R3²)

Gambar 4.7.

Rasio Kinerja Produk Bebas Bunga Maqashid Shariah Index

Pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020



Sumber : Data diolah 2021

Rasio kinerja yang ketiga dan tujuan kedua dalam Maqashid Shariah Index menggambarkan riba. Riba merupakan hal yang dilarang dalam sistem perbankan dan keuangan syariah. Hal ini disebabkan riba memberikan dampak buruk terhadap perekonomian dan menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Bank syariah diharuskan untuk menjalankan aktivitas perbankan khususnya aktivitas investasi yang dilakukan untuk terbebas dari namanya riba. Pada rasio ini secara garis besar bahwa pendapatan bank umum syariah yang menjadi sampel pada penelitian bukan berasal dari kegiatan membungakan uang.

4.2.1.3. Tujuan Mewujudkan Kesejahteraan (Jaib al-Maslahah)

Tabel 4.3.

Rasio Kinerja Mewujudkan Kesejahteraan Maqashid Shariah Index

Pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020

No	BUS	Rasio Kinerja Tujuan Ketiga		
		R1 (%)	R2 (%)	R3 (%)
1	BMI	0,07	4,08	69,23
2	BRIS	0,39	5,72	63,12

3	BJBS	1,66	0,00	71,50
4	BNIS	1,00	3,35	73,90
5	BSM	0,69	3,41	70,78
6	BMS	0,85	3,39	82,70
7	BCAS	0,74	0,00	0,62
8	BTPNS	6,42	0,00	0,49
9	BBS	0,21	0,00	0,42
10	BPDS	-1,15	1,21	1,19

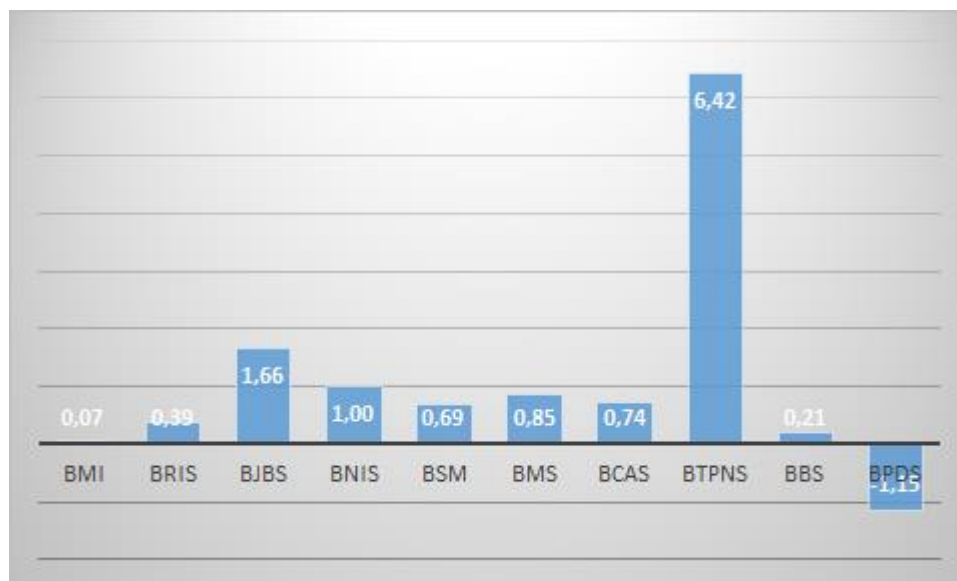
Sumber : Data diolah 2021

1). Profitabilitas (R1³)

Rasio kinerja yang pertama dan tujuan ketiga dalam Maqashid Shariah Index menggambarkan kesuksesan sebuah perusahaan dalam menjalankan fungsinya dari keuntungan yang diperolehnya. Semakin besar keuntungan yang didapatkan oleh bank syariah maka semakin akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan tidak hanya pemilik dan karyawan bank syariah tetapi juga berdampak pada semua stakeholder perbankan syariah.

Gambar 4.8.

Rasio Kinerja Profitabilitas Maqashid Shariah Index
Pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020



Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan Gambar 4.8. dapat diketahui bahwa Bank BTPN Syariah (BTPNS) menjadi peringkat tertinggi dibanding dengan bank syariah lainnya dengan memiliki persentase sebesar 6,42 % dari total laba bersih mencapai 4,4 triliun dari tahun 2015-2020. BTPNS mengalami peningkatan laba bersih setiap tahunnya. Hal ini, bisa dijadikan motivasi bagi bank syariah lainnya untuk terus meningkatkan laba bersih setiap tahunnya.

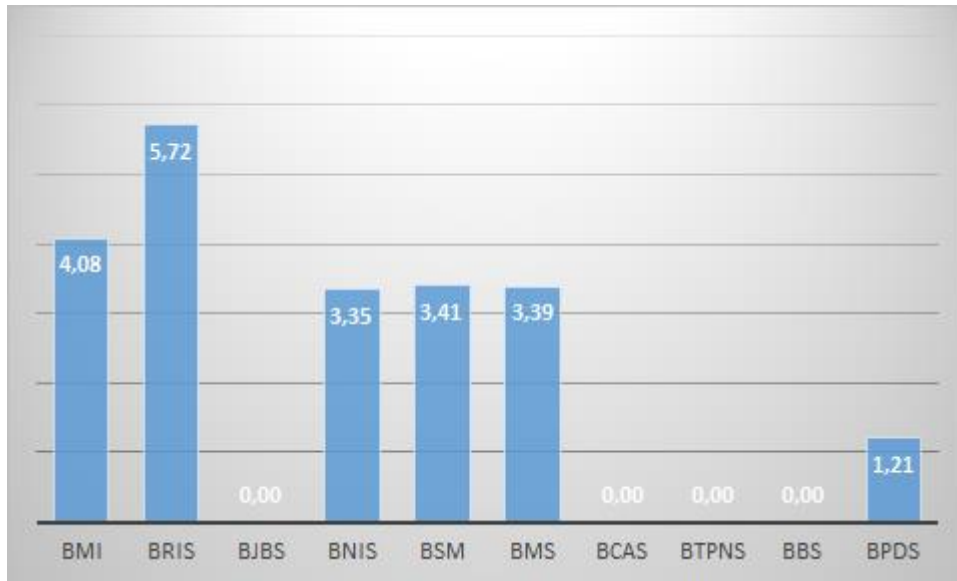
Pada urutan kedua dan urutan selanjutnya secara berturut-turut diduduki oleh Bank BJB Syariah (BJBS) dan Bank BNI Syariah (BNIS) dengan persentase yang dimilikinya sebesar 1,66% dan 1,00%. Sedangkan Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) mengalami persentase terendah sebesar -1,15%. Ini menjadi kekhawatiran bagi BPDS sehingga akan mempengaruhi rasio profitabilitas.

2). Pendapatan Personal (R2³)

Rasio kinerja yang kedua dan tujuan ketiga dalam Maqashid Shariah Index menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan adanya bank syariah melalui zakat yang dibayarkan oleh bank. Zakat yang didistribusikan kepada penerima zakat yang berhak menerimanya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 4.9.

Rasio Kinerja Pendapatan Personal Maqashid Shariah Index
Pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020



Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan Gambar 4.9. dapat diketahui yang memiliki persentase rasio tertinggi adalah Bank BRI Syariah (BRIS) dengan persentase sebesar 5,72 % dari zakat yang dibayarkan oleh bank sebesar 39 triliun. Dana zakat yang diperoleh dari BRIS disalurkan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga sosial lainnya. Pada urutan kedua diduduki oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan persentase sebesar 4,08 % dan Bank Syariah Mandiri (BSM) sebesar 3,41% . Sedangkan Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) memiliki urutan terendah dengan persentase sebesar 1,21 % . Meskipun BPDS menjadi urutan terendah akan tetapi cukup baik jika dibandingkan dengan BJB Syariah (BJBS), Bank BCA Syariah (BCAS), Bank BTPN Syariah (BTPNS) dan Bank Bukopin Syariah (BBS) yang tidak mengeluarkan zakatnya.

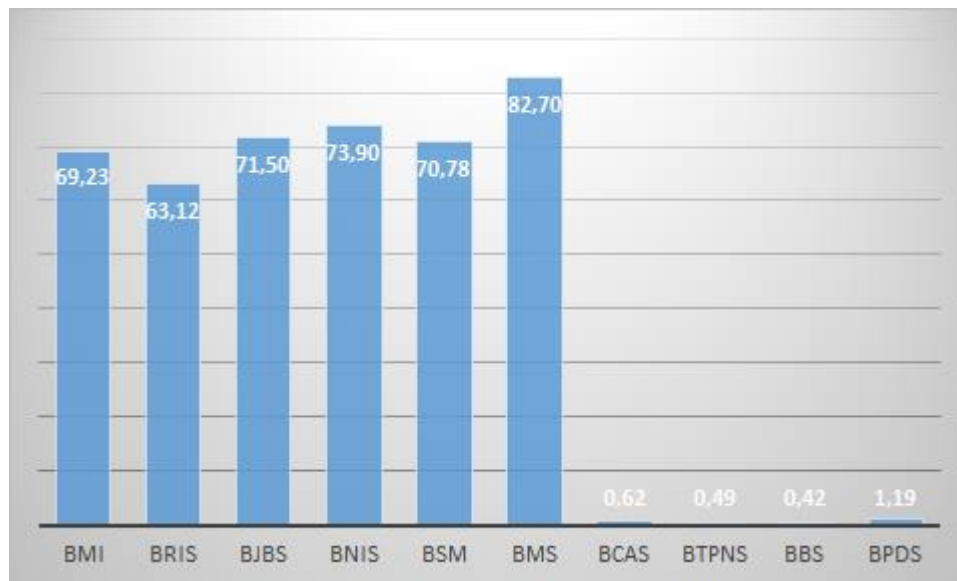
3). Investasi Sektor Rill (R3³)

Rasio kinerja yang ketiga dan tujuan ketiga dalam Maqashid Shariah Index menggambarkan pengalokasian dana yang digunakan untuk investasi terhadap total investasi yang dilakukan oleh bank syariah. Perbankan syariah diharapkan membuat prioritas mengenai aktivitas bisnisnya, mana yang memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Aktivitas sektor rill diyakini memberikan

dampak langsung yang positif terhadap perekonomian masyarakat dibandingkan dengan aktivitas investasi di sektor keuangan.

Gambar 4.10.

Rasio Kinerja Investasi Sektor Rill Maqashid Shariah Index
Pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020



Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan Gambar 4.10. dapat diketahui yang memiliki persentase rasio tertinggi adalah Bank Mega Syariah (BMS) dengan persentase sebesar 82,70 % dengan total investasi sektor rill 29 triliun. BMS mengalami peningkatan investasi sektor rill setiap tahunnya. Pada urutan kedua dan urutan selanjutnya secara berturut-turut diduduki oleh Bank BNI Syariah (BNIS) dan Bank BJB Syariah (BJBS) dengan masing-masing persentase sebesar 73,90 % dan 71,50% dan urutan terendah yaitu Bank Panin Dubai Syariah (BPDS) dengan persentase 1,19 %.

4.2.2. Kinerja Bank Umum Syariah dari Tujuan Pendidikan Individu selama tahun 2015-2020

Pada penelitian ini untuk mendapatkan Indikator Kinerja (IK) indeks maqashid syariah yaitu mengalikan setiap rasio kinerja pada bobot tujuan (variabel) dan bobot rasio Maqashid Shariah Index. Indikator kinerja Maqashid

Shariah Index yang pertama yaitu pendidikan individu yang memiliki empat rasio yaitu rasio pendidikan ($R1^1$), penelitian ($R2^1$), pelatihan ($R3^1$) dan publikasi ($R4^1$). Dalam konsep indeks maqashid syariah, pengeluaran dana pendidikan dan pelatihan ini termasuk kedalam melindungi terhadap jiwa (hifdzu aql). Berikut adalah tabel yang menyajikan indikator kinerja bank umum syariah dengan Maqashid Syariah Index dilihat dari pendidikan individu selama tahun 2015-2020.

Tabel 4.4.

Indikator Kinerja Pendidikan Individu Maqashid Syariah Index
Pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020

No	BUS	Tujuan Pendidikan Individu				
		$R1^1$	$R2^1$	$R3^1$	$R4^1$	IK 1
1	BMI	0,000118	0,000228	0,001038	0,001397	0,002781
2	BRIS	0,000024	0,000000	0,000287	0,000995	0,001305
3	BJBS	0,000004	0,000004	0,000000	0,000000	0,000008
4	BNIS	0,000094	0,000000	0,001470	0,002671	0,004236
5	BSM	0,000155	0,000009	0,000763	0,001023	0,001950
6	BMS	0,000000	0,000000	0,000443	0,000000	0,000443
7	BCAS	0,001036	0,000000	0,000000	0,000341	0,001377
8	BTPNS	0,001494	0,000000	0,001668	0,000345	0,003507
9	BBS	0,000000	0,000000	0,001124	0,001203	0,002327
10	BPDS	0,000471	0,000000	0,000510	0,001407	0,002387

Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui secara umum diantara 10 bank umum syariah yang menjadi sampel penelitian yang memiliki Indikator Kinerja tertinggi yaitu Bank BNI Syariah (BNIS) dengan indeks sebesar 0,004236 dari tahun 2015-2020. Dikarenakan BNIS memiliki keunggulan total indeks pada rasio publikasi ($R4^1$) dengan masing-masing sebesar 0,002671. Jika dilihat dari hasil indeks tersebut, BNIS membuktikan bahwa publikasi yang merupakan salah satu cara mengenalkan BNIS pada masyarakat baik mengenalkan mengenai sistem operasional BNIS maupun produk-produknya. Akan tetapi dari keunggulan-

keunggulan yang dimiliki BNIS, BNIS masih kurang untuk meningkatkan nilai indikator kinerja pada pendidikan individu ini, dikarenakan BNIS tidak mengalokasikan dananya untuk kegiatan pendidikan (R1¹), penelitian (R2¹) dan pelatihan (R3¹).

Sedangkan bank syariah yang memiliki indikator kinerja terendah yaitu Bank BJB Syariah (BJBS) dengan indeks sebesar 0,000008 dari tahun 2015-2020. Dikarenakan BJBS hanya mengalokasikan dananya untuk rasio pendidikan (R1¹) dan penelitian (R2¹) dengan masing-masing sebesar 0,000004. Pada laporan keuangan BJBS belum menjelaskan mengenai pengalokasian dana untuk pelatihan dan publikasi. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa bank syariah sudah menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat, karyawannya dan investor untuk kemajuan perekonomian berbasis prinsip syariah.

4.2.3. Kinerja Bank Umum Syariah dari Tujuan Menegakkan Keadilan selama tahun 2015-2020

Indikator kinerja Maqashid Shariah Index yang kedua yaitu menegakkan keadilan merupakan suatu bentuk keadilan bank syariah dengan nasabahnya. Dalam konsep indeks maqashid syariah, hal ini termasuk ke dalam hal melindungi terhadap harta (hifdzu maal) dan melindungi terhadap jiwa (hifdzu aql). Tujuan menegakkan keadilan ini memiliki tiga rasio yaitu pengembalian yang adil (R1²), fungsi distribusi (R2²), dan produk bebas bunga (R3²). Berikut adalah tabel yang menyajikan indikator kinerja bank umum syariah dengan Maqashid Shariah Index dilihat dari menegakkan keadilan selama tahun 2015-2020.

Tabel 4.5.

Indikator Kinerja Menegakkan Keadilan Maqashid Shariah Index
Pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020

No	BUS	Tujuan Menegakkan Keadilan			
		R1 ²	R2 ²	R3 ²	IK 2
1	BMI	0,001914	0,067758	0,155800	0,225472
2	BRIS	0,007757	0,055462	0,155800	0,219019

3	BJBS	-0,012216	0,032196	0,155800	0,175780
4	BNIS	0,018144	0,034568	0,155800	0,208512
5	BSM	0,014564	0,045917	0,155800	0,216281
6	BMS	0,009868	0,027139	0,155800	0,192806
7	BCAS	0,015355	0,072465	0,155800	0,243620
8	BTPNS	0,036762	0,001274	0,155800	0,193836
9	BBS	0,003894	0,000775	0,155800	0,160469
10	BPDS	-0,020473	0,106040	0,155800	0,241367

Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui secara umum di antara 10 bank umum syariah yang menjadi sampel penelitian yang memiliki Indikator Kinerja tertinggi yaitu BCA Syariah (BCAS) dengan indeks sebesar 0,243620 dari tahun 2015-2020.

Pada indikator kinerja terendah dimiliki oleh Bank Bukopin Syariah (BBS) dengan indeks sebesar 0,160469. Rendahnya indeks tersebut disebabkan dengan distribusi fungsional (R^2) dan produk bebas bunga (R^3) dengan indeks sebesar 0,000775 dan 0,155800. Secara keseluruhan bank umum syariah cukup baik dalam menegakkan keadilan sosial dan ekonomi, tujuan ini bermaksud agar terciptanya hubungan yang saling menguntungkan antara bank syariah dengan nasabahnya.

4.2.4. Kinerja Bank Umum Syariah dari Tujuan Mewujudkan Kesejahteraan selama tahun 2015-2020

Indikator kinerja Maqashid Shariah Index yang ketiga yaitu mewujudkan kesejahteraan. Kesejahteraan adalah mencerminkan kemampuan bank syariah dalam mewujudkan kesejahteraan para stakeholder. Dalam konsep indeks maqashid syariah, rasio profitabilitas dapat termasuk sebagai melindungi terhadap harta (hifdzu maal) dimana bank syariah mampu meningkatkan laba yang tinggi memungkinkan bank syariah berkontribusi lebih dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun stakeholder perbankan syariah. Tujuan mewujudkan kesejahteraan ini memiliki tiga rasio yaitu rasio profitabilitas (R^3),

pendapatan personal ($R2^3$) dan investasi sektor rill ($R3^3$). Berikut adalah tabel yang menyajikan indikator kinerja bank umum syariah dengan Maqashid Shariah Index dilihat dari mewujudkan kesejahteraan selama tahun 2015-2020.

Tabel 4.6.

Indikator Kinerja Mewujudkan Kesejahteraan Maqashid Shariah Index
Pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020

No	BUS	Tujuan Mewujudkan Kesejahteraan			
		R1	R2	R3	IK 3
1	BMI	0,000072	0,003549	0,074285	0,077906
2	BRIS	0,000371	0,004976	0,067729	0,073076
3	BJBS	-0,001584	0,000000	0,076716	0,075132
4	BNIS	0,000956	0,002917	0,079298	0,083171
5	BSM	0,000657	0,002969	0,075949	0,079576
6	BMS	0,000817	0,002948	0,088732	0,092497
7	BCAS	0,000707	0,000000	0,000664	0,001371
8	BTPNS	0,006145	0,000000	0,000526	0,006670
9	BBS	0,000204	0,000000	0,000449	0,000653
10	BPDS	-0,001105	0,001056	0,001276	0,001227

Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui secara umum di antara 10 bank umum syariah yang menjadi sampel penelitian yang memiliki Indikator Kinerja tertinggi yaitu Bank Mega Syariah (BMS) dengan indeks sebesar 0,092497 dari tahun 2015-2020. BMS memiliki indeks tertinggi dari 9 bank umum syariah lainnya, dikarenakan unggul pada rasio investasi sektor rill ($R3^3$) dengan indeks sebesar 0,088732. Indeks terendah pada indikator kinerja ini adalah Bank Bukopin Syariah (BBS) dengan indeks sebesar 0,000653. Posisi terendah ini disebabkan karena rendahnya rasio pendapatan personal ($R2^3$) dan investasi sektor rill ($R3^3$) dibandingkan dengan bank syariah lainnya dengan masing-masing indeks sebesar 0,000000 dan 0,000449.

4.2.5. Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia dilihat dari Maqashid Shariah Index selama tahun 2015-2020

Maqashid Shariah Index merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengukur kinerja perbankan syariah agar bank syariah beroperasi sesuai dengan tujuannya yang berprinsip syariah. Pendekatan ini mengacu pada konsep dari Abu Zahrah yang mengklasifikasikan ke dalam tiga tujuan yaitu : 1) Tadhīb al-Fard (pendidikan individu), 2) Iqamah al-Adl (menegakkan keadilan), 3) Jaib alMashlahah (menciptakan kesejahteraan). Tabel berikut adalah kinerja bank umum syariah dilihat dari Maqashid Shariah Index pada tahun 2015-2020.

Tabel 4.7.

Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia dilihat dari Maqashid Shariah

Index periode 2015-2020

No	BUS	<i>Maqhasid Syariah Index (MSI)</i>			MSI	Peringkat
		IK 1	IK 2	IK 3		
1	BMI	0,002781	0,225472	0,077906	0,306159	1
2	BRIS	0,001305	0,219019	0,073076	0,293400	4
3	BJBS	0,000008	0,175780	0,075132	0,250920	6
4	BNIS	0,004236	0,208512	0,083171	0,295918	3
5	BSM	0,001950	0,216281	0,079576	0,297807	2
6	BMS	0,000443	0,192806	0,092497	0,285747	5
7	BCAS	0,001377	0,243620	0,001371	0,246369	7
8	BTPNS	0,003507	0,193836	0,006670	0,204013	9
9	BBS	0,002327	0,160469	0,000653	0,163450	10
10	BPDS	0,002387	0,241367	0,001227	0,244981	8

Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa kinerja bank umum syariah dilihat dari Maqashid Shariah Index yang tertinggi dan memiliki peringkat pertama adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan indeks sebesar 0,306159.

Sedangkan Bank Bukopin Syariah (BBS) memiliki peringkat terakhir atau yang terendah untuk kinerja bank umum syariah dilihat dari Maqashid Shariah Index dengan indeks sebesar 0,163450. Posisi terendah ini disebabkan karena rendahnya indikator kinerja Maqashid Shariah Index yaitu menegakkan keadilan (IK 2) dengan indeks sebesar 0,160469. Hasil ini yang menyebabkan posisi BJBS di peringkat terakhir.

Secara umum bank syariah di Indonesia sudah memenuhi ketiga tujuan syariah secara baik, sehingga kedepannya pencapaian yang baik ini perlu dikembangkan dan di tingkatkan lagi. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar selalu baik harus adanya upaya untuk menetapkan dan menerapkan sebuah strategi yang baik dan juga tepat, seperti meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan, mengoptimalkan modal, mengembangkan produk-produk pembiayaan yang beragam dan menjaga semangat kerja sama antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah yang terkait.